

Modul

01

PDGK4401
Edisi 2

Paradigma Baru PKn di SD/MI

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A.
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.

Daftar Isi Modul

Modul 01	1.1
Paradigma Baru PKn di SD/MI	
Kegiatan Belajar 1	1.6
Karakteristik Warga Negara yang Demokratis	
Latihan	1.14
Rangkuman	1.14
Tes Formatif 1	1.15
Kegiatan Belajar 2	1.19
Model Pembelajaran PKn untuk Pengembangan Warga Negara yang Demokratis	
Latihan	1.35
Rangkuman	1.35
Tes Formatif 2	1.36
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.39
Daftar Pustaka	1.40



Pendahuluan

Modul ini membahas **paradigma** baru Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar di Indonesia. Yang dimaksud dengan paradigma dalam modul ini adalah **kerangka pikir** yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi bentuk konseptual baru PKn. Paradigma berarti juga suatu model atau rancang-bangun pikiran yang digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam konteks pemikiran itu akan kita pelajari: (1) Apa dan mengapa perlu mengembangkan paradigma baru PKn? (2) Bagaimana bentuk bangunan konseptual baru dari PKn tersebut?

Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dengan segala liku-liku permasalahannya. Sejak diproklamkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, bangsa dan negara Indonesia telah mengalami pasang surut dalam instrumentasi dan praksis kehidupannya, walaupun secara formal landasan filosofinya tetap, yakni Pancasila. Sistem kenegaraan yang dibangun dan dilaksanakan pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, pada dasarnya tidak banyak berubah, yakni tetap sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Namun demikian setiap era kehidupan itu berada dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang berbeda-beda. Kini konteks kehidupan global itu ditandai oleh semakin terbukanya kerja sama dan sekaligus persaingan antarbangsa/antarnegara, yang berarti juga semakin kompleksnya bangsa Indonesia mengarungi era reformasi di berbagai bidang menuju kehidupan masyarakat.

Dalam proses perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani, yakni masyarakat bangsa dan negara yang berpijak dari dan bermuara pada konsep dan nilai Pancasila dan UUD 1945, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, perlu menyesuaikan diri secara adaptif dan koheren dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Proses pembangunan karakter dan bangsa (*national and character building*) yang sejak Proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu secara konsisten dan sinambung dilakukan dan dikembangkan secara sistematis dan sistemik agar sesuai dengan suasana kebatinan, nilai, dan norma yang secara tersurat dan tersirat terkandung dalam sistem konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter dan bangsa harus dengan sengaja dimaksudkan untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Dalam proses itulah, pembangunan karakter dan bangsa harus disikapi dan diperlakukan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak yang secara konseptual dan programatik memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru.

Misi PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan

tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni *civic intelligence* atau kecerdasan warga negara, *civic responsibility* atau tanggung jawab warga negara dan *civic participation* atau partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara demokratis yang perlu dikembangkan bukan hanya kecerdasan rasional melainkan juga dalam kecerdasan spiritual, emosional dan sosial. Dengan demikian paradigma baru PKn secara konseptual dan programatik bersifat multidimensional. Bagaimana PKn mengembangkan warga negara yang demokratis melalui tiga misi pokoknya itu? Jawabannya akan diuraikan pada kegiatan belajar pertama modul ini.

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKn. Dalam modul ini Anda akan diperkenalkan dengan model proyek-belajar berbasis masalah, yang secara nasional lebih dikenal “Proyek-belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia (PKKBI)”. Proyek-belajar ini merupakan salah satu model belajar unggulan dan dinilai paling komprehensif dalam mewadahi proses pengembangan ketiga karakteristik warga negara yang perlu dikembangkan sebagai paradigma baru PKn. Model pembelajaran PKn untuk warga negara yang demokratis ini akan diuraikan pada kegiatan belajar kedua modul ini.

Dalam modul ini Anda akan diajak menganalisis berbagai sisi kehidupan warga negara yang demokratis dan bagaimana pembelajaran untuk membentuk warga negara yang demokratis itu melalui paradigma baru PKn. Sehingga dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kualitas warga negara Indonesia yang demokratis.
2. Mampu menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran PKn untuk menghasilkan karakteristik kewarganegaraan yang demokratis.

Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kualitas warga negara Indonesia yang demokratis, secara konseptual merupakan *subject-specific pedagogy* atau didaktik-metodik khusus terkait substansi atau materi PKn. Sementara itu, kemampuan menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran PKn untuk menghasilkan karakteristik kewarganegaraan yang demokratis merupakan *subject-specific pedagogy* terkait aspek *learning experiences* atau pengalaman belajar atau peserta didik Anda sebagai mahasiswa-guru atau *student-teacher*.

Oleh karena itu, kemampuan di atas sangat penting bagi Anda sebagai mahasiswa calon sarjana PGSD yang harus membelajarkan PKn sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran PKn di SD. Selain itu, penguasaan Anda mengenai paradigma baru PKn baik tentang kualitas warga negara yang demokratis maupun pembelajaran untuk mengembangkan warga negara yang demokratis sangat berguna dalam mengatasi kesulitan memilih dan menyusun materi serta menentukan model pembelajaran yang cocok untuk pokok bahasan tertentu. Keunggulan dari paradigma baru PKn dengan model pembelajarannya merupakan pemikiran maju dalam menerapkan pendekatan

pembelajaran *student-active learning*, yakni pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan belajar siswa aktif dan *inquiry approach*, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses penggalan informasi dalam rangka pemecahan masalah atau perumusan generalisasi. Model pembelajaran PKn dengan paradigma baru memiliki karakteristik sebagai berikut: membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis; memfasilitasi siswa untuk mengenal, memilih dan memecahkan masalah; dan melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah dan keterampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inkuiri.

Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan Anda akan tercerahkan dan dapat mengatasi kesulitan dalam menguasai materi dan membelajarkan PKn yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Dengan demikian, kemampuan Anda dalam menerapkan model pembelajaran PKn akan menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan yang memadai. Dengan kata lain, para siswa pun akan merasakan manfaatnya dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para siswa.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut.

1. Karakteristik warga negara yang demokratis.
2. Pembelajaran PKn untuk warga negara yang demokratis.

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut.

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda paham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (*Glosarium*) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan keharusan menguasai PKn SD dengan paradigma baru.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Karakteristik Warga Negara yang Demokratis

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa kebutuhan akan adanya paradigma baru PKn saat ini sudah mendesak. Bangsa Indonesia yang saat ini tengah mengalami suatu perubahan diharapkan bergerak ke arah pendewasaan hingga terbentuknya masyarakat yang betul-betul demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial sesuai dengan konsep, nilai, norma dan moralitas yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, yang dikuatkan dengan komitmen gerakan reformasi dalam segala bidang, terutama bidang politik dan hukum. Namun demikian, pengembangan masyarakat yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial tersebut tentu tidaklah mudah, terutama bagi masyarakat Indonesia yang secara historis belum memiliki pengalaman utuh berkehidupan yang betul-betul demokratis, perkembangan ekonomi yang masih terbatas, identitas nasional yang masih rapuh, dan budaya kewarganegaraan yang belum terbentuk. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat Indonesia demokratis yang religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial itu perlu waktu, upaya gigih yang konsisten, dan komitmen kebangsaan, serta pendidikan demokrasi yang sinambung. Perlu pula digarisbawahi bahwa masyarakat tidak dapat hidup berdemokrasi dengan baik apabila mereka dalam keadaan tidak berpendidikan, bodoh, apatis, dan miskin. Masyarakat demokratis hanya dapat tercipta apabila masyarakatnya berpendidikan memadai dan secara ekonomis kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi. Dengan demikian, masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakatnya terdidik baik dan sejahtera, sehingga mereka mau dan mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengingat adanya persyaratan hidup berdemokrasi tersebut, Anda diminta untuk mendiskusikan masalah-masalah konseptual seperti apakah hakikat demokrasi itu? Apakah pernah ada masyarakat demokratis itu? Mungkinkah bangsa Indonesia dapat hidup secara demokratis? Apakah upaya kita untuk membentuk masyarakat demokratis itu? Secara khusus, upaya pendidikan atau pembelajaran apakah yang menurut Anda paling tepat untuk membina dan mengembangkan budaya demokratis itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda sebaiknya membentuk kelompok belajar atau kelompok diskusi sekitar 3-4 orang. Dengan sumber pengetahuan yang telah Anda kuasai, lakukanlah diskusi itu. Kemudian, buatlah laporan hasil diskusi yang telah disepakati bersama.

Baiklah, apabila Anda telah mencoba membahas pertanyaan di atas ikutilah dan bandingkanlah hasil laporan diskusi Anda dengan uraian berikut ini.

Secara etimologis atau pengertian kata, demokrasi berasal dari kata dalam bahasa latin *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau rakyat turut memerintah atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung, yakni melalui perwakilan setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi oleh Abraham Lincoln, diartikan “*the government from the people, by the people and for the people*” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Dalam sejarah politik diketahui bahwa demokrasi telah tumbuh sejak jaman Yunani Kuno, yakni ketika munculnya istilah Negara Kota (*City State* atau *Polis*) Athena pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah pun dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang yang berkumpul dalam suatu lapangan ketika ada pemilihan umum.

Coba Anda diskusikan dalam kelompok belajar masing-masing, apakah dalam kondisi sekarang dimungkinkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi langsung? Kalau tidak mengapa?

Baiklah apabila Anda telah mendiskusikannya, coba ikuti dan bandingkan jawaban Anda dengan uraian berikut ini.

Dalam kondisi seperti sekarang negara kota seperti *city state* di Yunani sudah tidak dijumpai lagi, karena semua negara sudah menjadi *nation state* atau negara nasional, yang jumlah penduduknya besar dan heterogen. Karakteristik negara seperti itulah yang merupakan ciri masyarakat negara modern. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat kerumitan permasalahan yang tinggi maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung adalah suatu hal yang mustahil. Bentuk demokrasi paling umum saat ini adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, *para pejabat* membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan mandatnya untuk memerintah melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelebagaan* dari kebebasan. Lebih lanjut Alamudi (1991) mengemukakan soko guru demokrasi, yaitu (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan hak asasi manusia; (6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7) persamaan di depan hukum; (8) proses hukum yang wajar; (9) pembatasan pemerintah secara konstitusional; (10) pluralisme sosial, ekonomi dan politik; (11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas, namun tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang.

Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Ahmad Sanusi (1999) mengidentifikasi Sepuluh Pilar demokrasi konstitusional Indonesia (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*) yang digali dari filsafat dan ideologi negara Pancasila, dan UUD 1945, yakni demokrasi yang: (1) ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) melindungi dan memajukan hak asasi manusia; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat; (4) meningkatkan kecerdasan bangsa; (5) menerapkan pembagian kekuasaan negara; (6) mengembangkan otonomi daerah; (7) menegakkan supremasi hukum (*Rule of Law*); (8) menerapkan peradilan yang bebas; (9) mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan (10) mewujudkan keadilan sosial.

Dari hasil analisis terhadap UUD 1945 di atas, jelaslah bahwa pilar-pilar demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai demokrasi konstitusional. Namun dalam aplikasi sudah dapat dipastikan bahwa negara kita belum dapat melaksanakannya secara menyeluruh. Bahmueller (1996) menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan atau berarti dua (*an ambiguous democratic moment*). Sebagai ilustrasi ia melukiskan bahwa pada permulaan tahun 1990 mulai muncul gelombang perubahan demokrasi

baru. Walaupun belum sepenuhnya berhasil, gerakan untuk demokrasi semakin terbuka di Cina. Demikian pula di Afrika, keinginan untuk adanya multipartai dalam pemilu semakin bermunculan ke permukaan dari satu negara ke negara lainnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, gambarannya menjadi tidak begitu jelas. Walaupun sejumlah ahli dan pengamat banyak berteriak bahwa pada saat itu adalah masa kemenangan demokrasi, tetapi beberapa tahun kemudian kembali menjalani ketidakpastian. Perang antaretnis dan perjuangan untuk merdeka terjadi di mana-mana, terutama di negara-negara bekas satelit Rusia dan Eropa Timur. Di India, pelaksanaan demokrasi pun mengalami pasang surut. Di sini pernah terjadi perang saudara antara kelompok Muslim dan Hindu yang pernah mengancam status India sebagai negara demokrasi. Di bagian benua Eropa, ada pula gerakan yang mengarah pada perdamaian dan penegakan demokrasi baru, seperti Republik Cheko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Slovakia, dan Polandia, kecuali di bekas negara pecahan Yugoslavia di mana terjadi adanya perang antar etnis. Ada upaya dari kelompok Serbia sebagai mayoritas yang ingin membersihkan etnis Bosnia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur umumnya tengah mengalami perubahan pasang surut dalam demokrasi konstitusional.

Dengan melakukan refleksi dari uraian di atas, muncul pertanyaan: apa yang mesti dilakukan dalam melangkah ke depan demi tercapainya suatu masyarakat demokratis yang dicita-citakan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya Anda memperhatikan sebuah hasil penelitian Cogan (1998) yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi berikut ini.

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
5. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnik, dan sebagainya).
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Atas dasar hasil penelitian ini, tentunya kita harus berpikir dan mempertanyakan kembali tentang peran pendidikan kewarganegaraan di negara kita. Bagaimana kita memantapkan, mengaktualisasi dan mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan kerangka berpikir yang baru?

Suryadi dan Somardi (1999) mengemukakan bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Negara adalah suatu bentuk khusus dari tata kehidupan sosial yang dibangun dari sejumlah komponen dasar di dalam suatu sistem yang integral. Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara terdiri dari sistem *personal*, sistem *kelembagaan*, sistem *normatif*, sistem *kewilayahan*, dan sistem *ideologis* sebagai faktor integratif bagi seluruh komponen. Lima sistem tata kehidupan bernegara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan ‘yang diperintah’. Kedua jenis subjek ini yaitu pemerintah dan yang diperintah pada dasarnya memiliki atribut yang sama, yaitu sebagai warga negara, namun dalam fungsinya yang berlainan. Dari perspektif demokrasi, yang disebut pertama adalah pemegang mandat atau amanat dengan seperangkat wewenangnya untuk mengelola kepentingan bersama dan mewujudkan tujuan bersama. Fungsi yang kedua, sebagai pemberi mandat, pemegang kedaulatan. Dengan demikian, pola hubungan di antara kedua subjek ini pada dasarnya merupakan hubungan kepercayaan (*trust*). Pemberian kepercayaan atau transfer kekuasaan di antara kedua subjek di atas diselenggarakan melalui proses dan mekanisme politik dengan mekanisme yang disetujui bersama. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap proses dan mekanisme ini merupakan landasan utama untuk memahami posisi, fungsi-peran, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kapasitasnya masing-masing.

Seperti telah dikemukakan dalam bagian yang lalu, suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menempati jabatan publik. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan mengemban misi bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional Indonesia maka selayaknya sistem personal dari kehidupan bernegara ini harus menjadi salah satu substansi pokoknya.

Kedua, sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan ini merupakan prasyarat dasar bagi warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga, proses dan mekanisme perekrutan para pejabat dari masing-masing lembaga, serta aspek-aspek lainnya, perlu dipahami oleh setiap warga negara agar partisipasinya dalam kehidupan bernegara dapat ditingkatkan.

Ketiga, sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara. Pemahaman terhadap sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan prasyarat bagi partisipasi warga negara secara nalar dan penuh tanggung jawab.

Keempat, sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia.

Kelima, sistem ideologis merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena sifatnya sebagai faktor integratif maka sistem ideologi ini hendaknya memayungi seluruh komponen sistem lainnya.

Tinjauan sistemik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang eksistensi kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara secara sehat merupakan fungsi dari seluruh komponen sistemnya. Dengan kata lain, kerusakan dalam satu komponen sistem akan mengganggu berfungsinya sistem kenegaraan secara keseluruhan.

Di samping itu, potret kehidupan bernegara secara sistemik ini membantu memperjelas hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai satu bidang yang multi-disipliner dan multi-dimensional. Meskipun demikian, pendekatan dalam pengorganisasian PKn tetap bersifat terpadu (*integrated*). Sebagai contoh, materi hukum sebut saja konstitusi diajarkan dalam kerangka memperkuat pemahaman tentang bentuk pemerintahan. Demikian pula halnya dengan materi-materi lainnya.

Pendidikan nilai, moral, dan/atau budi pekerti mendapat tempat khusus dalam pokok-pokok bahasan yang secara langsung berkaitan dengan “warga negara” (sistem personal). Di samping itu, muatan nilai, moral, dan budi pekerti yang diharapkan dari warga negara, akan selalu menjadi pengiring dalam setiap pokok bahasan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembelajaran mengenai pokok bahasan apapun pada akhirnya harus mendukung terbentuknya *partisipasi warga negara yang penuh nalar dan bertanggung jawab* dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Dengan memperhatikan atribut-atribut kewarganegaraan di atas, dan struktur pengorganisasian yang berorientasi pada sistem kehidupan bernegara maka materi pendidikan kewarganegaraan selayaknya memuat komponen-komponen *pengetahuan, keterampilan, dan disposisi* kepribadian warga negara, yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global.

Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi guna membantu menciptakan masyarakat demokratis? Keterampilan apakah yang perlu dimiliki oleh warga negara dan perlu dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan?

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tetangganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Jika suaranya ingin didengar, mereka harus menjadi peserta aktif dalam proses politik. Selain dalam pemilihan umum, kampanye, dan pemberian suara bagi lembaga-lembaga demokrasi,

warga negara hendaknya memahami bahwa di luar proses politik itu pun masih terbuka kesempatan-kesempatan berpartisipasi. Terakhir, mereka hendaknya memahami bahwa pencapaian tujuan-tujuan individu dan tujuan-tujuan umum berjalan bergandengan dengan partisipasi dalam masyarakat demokratis.

Komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah komponen keterampilan bermasyarakat. Agar warga negara dapat menjalankan hak-hak dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berpemerintahan sendiri, mereka bukan hanya perlu memiliki pengetahuan berkenaan dengan materi pokok di atas, mereka perlu pula untuk memiliki keterampilan-keterampilan intelektual dan partisipasi yang relevan.

Keterampilan intelektual dalam mata pelajaran PKn tidak terpisahkan dari materinya. Agar mampu berpikir kritis tentang suatu persoalan politik, misalnya orang harus memiliki pemahaman tentang persoalan tersebut, sejarahnya, relevansinya saat ini, serta memiliki penguasaan seperangkat terhadap pendekatan atau pertimbangan intelektual yang berguna dalam menghadapi persoalan tersebut.

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain *keterampilan berpikir kritis*, yang meliputi keterampilan *mengidentifikasi* dan *mendeskrripsikan*; *menjelaskan* dan *menganalisis*; *mengevaluasi*, *menentukan* dan *mempertahankan* sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang baik memberi bekal kemampuan kepada warga negara untuk mengidentifikasi atau memberi makna dengan berbagai simbol fisik, seperti bendera, monumen nasional atau peristiwa-peristiwa politik dan kemasyarakatan, dan berbagai simbol non-fisik, seperti gagasan-gagasan atau konsep-konsep termasuk patriotisme, hak-hak mayoritas dan minoritas, masyarakat madani, dan paham konstitusi.

Keterampilan intelektual lainnya yang dikembangkan melalui PKn adalah keterampilan *mendeskrripsikan*, yaitu mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses, seperti proses pengawasan dan keseimbangan (pengawasan dari lembaga legislatif atau hak uji materiil dari Mahkamah Agung) merupakan petunjuk dari adanya pemahaman. Kemampuan mengamati dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan, misalnya partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, imigrasi atau ketenagakerjaan membantu warga negara menganalisis peristiwa-peristiwa saat ini di dalam suatu pola yang berjangka panjang.

Pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru harus mampu mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan dan menganalisis. Jika warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berfungsi, misalnya sistem negara kesatuan dengan desentralisasi, sistem hukum atau sistem pengawasan dan keseimbangan maka mereka akan lebih berkemampuan untuk mendeteksi dan membantu memperbaiki kesalahan masa lampaunya.

Dalam masyarakat yang berpemerintahan sendiri, warga negara merupakan para pengambil keputusan. Oleh sebab itu, mereka perlu mengembangkan dan terus memperbaiki keterampilannya dalam menjelaskan, mengevaluasi, menentukan, dan

mempertahankan pendapatnya. Keterampilan-keterampilan ini penting jika warga negara harus menilai persoalan-persoalan tentang agenda publik, menilai persoalan-persoalan dan mendiskusikan penilaiannya dengan orang lain dalam diskusi umum atau pribadi.

Di samping untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan intelektual, pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis harus memusatkan pada keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterampilan *berinteraksi*, *memantau*, dan *mempengaruhi*. Keterampilan berinteraksi menunjuk pada keterampilan yang diperlukan warga negara untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi mengandung arti tanggap terhadap sesama warga negara lainnya. Berinteraksi meliputi aktivitas-aktivitas seperti bertanya, menjawab, dan berdiskusi dengan sopan santun, serta membentuk koalisi dan mengelola konflik menurut cara yang adil dan damai. Keterampilan memantau politik dan pemerintahan, menunjuk pada keterampilan-keterampilan yang diperlukan warga negara untuk menelusuri penanganan persoalan-persoalan melalui proses politik dan oleh pemerintah.

Pengembangan keterampilan berpartisipasi perlu dimulai sejak kelas-kelas rendah sampai mereka selesai menempuh satu jenjang persekolahan. Siswa kelas-kelas rendah dapat belajar berinteraksi dalam kelompok-kelompok atau masyarakat kecil, menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kematangannya. Mereka dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi atau membuat kesepakatan. Lebih lanjut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan memantau dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka diharapkan belajar meneliti persoalan-persoalan publik dengan menggunakan sumber-sumber elektronik, perpustakaan, telepon, hubungan antarperseorangan, dan media. Hadir dalam pertemuan publik mulai dari dewan siswa sampai pada dewan sekolah, dewan kota, komisi daerah, dan dengar pendapat dari lembaga legislatif harus menjadi satu bagian pengalaman siswa sekolah yang diperlukan.

Pengamatan proses pengadilan dan cara kerja sistem peradilan pun harus menjadi satu bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan. Namun, pengamatan itu sendiri tidak cukup. Para siswa bukan hanya perlu dipersiapkan untuk pengalaman-pengalaman demikian, mereka pun memerlukan kesempatan yang terencana dan sistematis untuk merefleksikan pengalaman-pengalamannya di bawah bimbingan guru yang berpengetahuan dan berketerampilan.

Komponen penting yang ketiga dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu *disposisi kewarganegaraan*, menunjuk pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional.

Seperti aspek keterampilan, disposisi kepribadian berkembang secara perlahan-lahan sepanjang waktu dan sebagai hasil dari apa yang dipelajari dan dialami seseorang

di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi-organisasi masyarakat yang demokratis. Pengalaman-pengalaman tersebut harus menghasilkan pemahaman bahwa demokrasi memerlukan pengaturan diri secara bertanggung jawab dari setiap individu; dan seseorang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ciri-ciri watak pribadi, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan dari setiap individu sangat diperlukan. Demikian pula, ciri-ciri watak kemasyarakatan tidak kurang pentingnya. Ciri-ciri, seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, rasa hormat terhadap peraturan hukum, berpikir kritis, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi sangat diperlukan juga bagi keberhasilan demokrasi.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskan *bagaimana latihan antarkomponen kewarganegaraan yang demokratis dilihat dari keterpaduan antara civic knowledge, civic dispositions, civic skill.*

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Gunakan “diagram ven” yakni diagram tiga lingkaran yang saling tumpang tindih untuk melukiskan keterpaduan *civic knowledge, civic dispositions, civic skill!*
- 2) Perhatikan *irisian A*. antara *civic knowledge* dengan *civic dispositions*, antara *civic knowledge* dengan *civic skill*, antara *civic dispositions* dengan *civic skill*, dan antara *knowledge*.
- 3) Tempatkan pada masing-masing irisan itu *perilaku yang relevan*, yaitu *Competent, Confident, Commitment*, dan *intelligent*.
- 4) Cobalah Anda cek apakah Anda menempatkan *Competent* pada irisan B, *Confident* pada irisan A, *Commitment* pada *irisian C*, dan *Intelligent* pada *irisian D*?

Berikan *penjelasan bebas* dengan bahasan Anda sendiri mengapa keterpaduan itu dapat digambarkan, seperti tersebut di atas.



Rangkuman

Masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang layak, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (*melalui perwakilan*) setelah adanya proses pemilihan umum

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan.

Dalam masyarakat demokratis terdapat 5 sistem tata kehidupan, yaitu (1) *sistem personal* adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas “pemerintah” dan “yang diperintah”; (2) *sistem kelembagaan* menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) *sistem normatif* adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara; (4) *sistem kewilayahan* menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia; (5) *sistem ideologis* merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PKn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen *pengetahuan*, *keterampilan*, dan *disposisi* kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global.

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tetangga, masyarakat, dan bangsanya.

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan *mengidentifikasi* dan *mendeskrripsikan*; *menjelaskan* dan *menganalisis*; *mengevaluasi*, *menentukan* dan *mempertahankan* sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kedudukan dan kondisi rakyat hendaknya memiliki karakteristik, *kecuali*
 - A. secara ekonomis sudah kuat
 - B. berpendidikan yang layak
 - C. berpikir dan bersikap cerdas
 - D. kebebasan tanpa batas

- 2) Demokrasi langsung pernah dipraktikkan di Athena pada abad ke-6 sampai ke-3 SM dalam pemerintahan Negara Kota (Polis). Sistem ini dapat dilaksanakan karena, *kecuali*
 - A. jumlah penduduk saat itu masih kecil
 - B. tingkat permasalahan masih sederhana
 - C. rakyat memiliki pandangan yang sama terhadap pemimpinnya
 - D. rakyat dapat berkumpul pada satu tempat dalam waktu yang sama

- 3) Dalam demokrasi, penguasa pada hakikatnya mendapat kekuasaan dari rakyat. Konsekuensinya penguasa memiliki wewenang dalam
 - A. memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya
 - B. bertindak dengan dalih atas nama rakyat
 - C. menegakkan aturan yang dibuatnya
 - D. bertindak mengutamakan kaum minoritas

- 4) Menurut Alamudi demokrasi merupakan pelembagaan dari kebebasan. Artinya demokrasi merupakan
 - A. prinsip-prinsip kebebasan
 - B. gagasan pentingnya kebebasan
 - C. praktik dan prosedur pelaksanaan kebebasan
 - D. jaminan kebebasan penguasa

- 5) Dalam negara demokratis, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas karena suara mayoritas....
 - A. sudah pasti memiliki kebenaran
 - B. memiliki kekuasaan mutlak terhadap minoritas
 - C. memiliki sifat demokratis
 - D. memiliki dukungan yang lebih banyak

- 6) Prinsip demokrasi konstitusional di negara RI sebenarnya telah ada dalam UUD 1945. Hal ini dapat dianalisis dari bagian pembukaan maupun pasal-pasal yang memuat ketentuan, *kecuali*
 - A. supremasi hukum
 - B. pemisahan kekuasaan negara secara tegas
 - C. kedaulatan rakyat
 - D. kesejahteraan rakyat

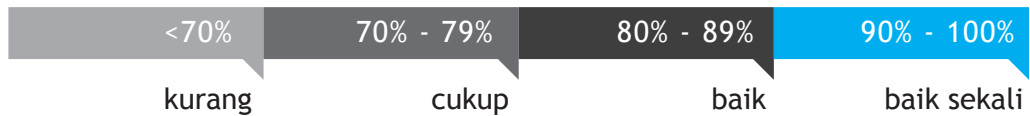
- 7) Warga negara yang demokratis hendaknya dapat menjawab tantangan masa depan. Hal ini dapat diidentifikasi, yaitu dengan karakteristik
 - A. mampu berpikir kritis dan sistematis
 - B. mengenal masalah sebagai warga masyarakat lokal

- C. lebih mengutamakan adanya persamaan budaya
 - D. mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik yang terbatas
- 8) Sistem personal sebagai salah satu sistem tata kehidupan bernegara yang berpandangan bahwa
- A. subjek penyelenggara negara adalah penguasa
 - B. subjek penyelenggara kehidupan bernegara adalah rakyat
 - C. pemerintah dan yang diperintah sama-sama warga negara
 - D. pemerintah dan yang diperintah memiliki peran yang sama
- 9) Komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara yang bersifat integratif dan memayungi seluruh komponen sistem lainnya adalah sistem
- A. kelembagaan
 - B. normatif
 - C. kewilayahan
 - D. ideologis
- 10) Pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang lebih menekankan pada
- A. penguasaan materi secara komprehensif
 - B. partisipasi warga negara yang penuh nalar dan bertanggung jawab
 - C. perilaku yang sesuai dengan norma yang ada
 - D. sikap mendahulukan kewajiban daripada hak

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai

Model Pembelajaran PKn untuk Pengembangan Warga Negara yang Demokratis

Kegiatan Belajar 2

Pada kegiatan belajar pertama dalam modul ini, Anda telah mengenal paradigma baru PKn di Indonesia. Bagaimana materi PKn itu dapat dibelajarkan kepada anak didik? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya Anda sudah paham karena Anda semua adalah kaum pendidik yang sehari-hari menjalankan kegiatan pembelajaran. Namun demikian, Anda akan diajak untuk merenungkan dan mempertanyakan apakah cara membelajarkan PKn itu sudah sesuai dengan hakikat pembelajaran PKn? Sudahkah hasil belajar itu diserap oleh anak didik sehingga menjadi salah satu kemampuan yang dimilikinya? Lebih jauh lagi apakah hasil belajar itu telah mempribadi hingga mengamalkannya? Pertanyaan yang paling penting “Sudahkah kita membelajarkan anak didik dengan cara mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik?”. Semua pertanyaan ini hanya perlu dijawab cukup dalam hati saja.

Kita mewarisi pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang “berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam prinsip pemerintahan demokratis terkandung hak berpartisipasi dari setiap warga negara, seperti hak untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan hak untuk melindungi hak asasi manusia. Hak berpartisipasi ini membebaskan tanggung jawab tertentu kepada setiap warga negara. Di antara tanggung jawab ini adalah tanggung jawab untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpartisipasi secara cerdas, dan tanggung jawab untuk berkehendak meningkatkan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Agar warga negara dapat berpartisipasi secara efektif, diperlukan bekal pengetahuan dan keterampilan, pengalaman praktis, dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi warga negara. Menyiapkan warga negara yang memiliki kualitas, seperti ini merupakan tugas pokok kependidikan, baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Khusus dalam pendidikan persekolahan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peranan yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan membina warga negara dengan kualitas, seperti tersebut di atas.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga

negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat

Menimbang dasar pikiran dan tujuan PKn di atas, selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian Anda sebagai guru atau calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yang masih lemah untuk mengantarkan para peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. Pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (*Portfolio-based learning*) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut.

Menyadari betapa pentingnya proses pembudayaan demokrasi dan pemberdayaan peserta didik sebagai warga negara demokratis sepanjang hayat, perlu diberi suasana pemberian keteladanan (*ing ngarsa sung tulada*), pembangunan kemauan (*ing madya mangun karsa*) dan pengembangan kreativitas peserta didik (*tut wuri handayani*) dalam proses pembelajaran PKn. Oleh karena itu, sekolah dasar sebagai satuan pendidikan yang dikelola dengan konsep Manajemen berbasis Sekolah (MBS) dengan kewenangan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara ajek mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: pandangannya yang pluralistik-uniter dalam makna *Bhineka Tunggal Ika*, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, *tujuannya* yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan *latarnya* (*setting*)

yang menghasilkan *pengalaman belajarnya* yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Bila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. *Ketiga*, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan demikian rupa sebagai “*democratic laboratory atau lab demokrasi*” dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai “*micro cosmos of democracy atau lingkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat mikro*”, dan memperlakukan masyarakat luas sebagai “*open global classroom*” atau sebagai kelas global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”- **belajar tentang demokrasi, dalam situasi yang demokratis, dan untuk membangun kehidupan demokratis.**

Secara konseptual warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab memiliki ciri kualitatif dan indikator perilaku. Ciri kualitatif merujuk pada tuntutan normatif-derivatif atau tuntutan yang diturunkan dari ketentuan perundang-undangan serta ketentuan normatif lainnya yang bersifat sosial-kultural yang koheren dengan tuntutan normatif-derivatif. Apa saja yang menjadi ciri utama warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu? Secara konseptual warga negara yang demokratis antara lain memiliki ciri-ciri umum atau ciri generik sebagai berikut. (Winataputra: 2005)

INDIKATOR PERILAKU UMUM
SISWA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

NO	DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB	INDIKATOR PERILAKU SISWA
1	<i>Pro bono publico</i> yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergotong-royong 2. Mematuhi tata tertib lalu lintas 3. Tidak membuang sampah sebarangan 4. Menjaga harta milik publik seperti telepon umum, ATM 5. Menjaga kekayaan sekolah 6. Memelihara sumber-sumber kekayaan alam seperti mata air, cagar alam 7. Memilih pemimpin atas dasar pertimbangan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan
2	<i>Pro patria primus patrialis</i> yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak, iuran sekolah secara berdisiplin 2. Menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan pemimpin 3. Menjaga berbagai simbol kenegaraan seperti Bendera Merah Putih, Lambang Negara, Lagu Indonesia Raya, Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden 4. Mau menjadi relawan sosial bila diperlukan 5. Mau menjadi relawan untuk membela negara
3	Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mau mendengarkan pendapat orang lain 2. Tidak membenci orang lain yang berbeda pendirian 3. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan diri sendiri 4. Menghormati orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
4	Terbuka menerima pendapat orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan orang lain yang sedang berbicara 2. Suka meminta pendapat orang lain 3. Mempertimbangkan pendapat orang lain yang lebih baik 4. Mau menerima pendapat orang lain yang dinilai lebih baik 5. Mengakui pandangan sendiri yang ternyata keliru
5	Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendapat secara lisan dan/ atau tulisan 2. Mau memberikan pendapat secara tulus 3. Memberikan pendapat dengan menggunakan tata krama dan santun bahasa yang baik 4. Selalu menopang pendapatnya dengan alasan atau argumen yang kuat
6	Bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap cermat dalam mendengarkan pendapat orang lain 2. Mau menggali alasan di balik pendapat orang lain yang dikemukakan 3. Mau mencari alasan lain yang lebih tepat dari pendapat orang lain 4. Menyanggah pendapat orang lain dengan pandangan diri sendiri yang didukung argumen yang kuat

NO	DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB	INDIKATOR PERILAKU SISWA
7	Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih persoalan dengan cermat 2. Mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan 3. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang mendukung 4. Memilih alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan layak 5. Bersifat antisipatif terhadap keputusan pemecahan masalah yang diambil
8	Menghormati hak orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengambil hak orang lain dengan cara apapun 2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan haknya dengan baik 3. Selalu menjaga agar tidak mengganggu orang lain 4. Tidak mencemoohkan orang lain karena berbeda bahasa dan budaya
9	Menghormati kekuasaan yang sah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai siswa 2. Menghormati pemerintah pusat, daerah, dan tokoh panutan dalam masyarakat 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam lingkungan sendiri, seperti sekolah dan masyarakat 4. Turut serta memantau pelaksanaan kebijakan publik
10	Bersikap adil dan tidak diskriminatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlakukan orang lain sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam lingkungannya 2. Tidak bersifat kesukuan atau kedaerahan 3. Tidak fanatik terhadap golongannya 4. Menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri 5. Menerapkan prinsip meritokratif dalam berbagi keuntungan
11	Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu menyampaikan amanat yang diperoleh kepada yang berhak 2. Mau mengganti sesuatu amanat yang hilang atau cacat karena kecerobohan sendiri 3. Melaksanakan tugas yang diberikan guru, Kepala Sekolah dengan baik 4. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan cara terbaik yang bisa dilakukan 5. Berorientasi pada pencapaian hasil yang terbaik dalam memenuhi tugas-tugas

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh tentang model pembelajaran PKn yang berbasis portofolio Anda perlu pula mengenali materi pembelajarannya. Materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKn yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Anda empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, yakni:

1. Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan.
2. Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran.

3. Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan.
4. Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.

PKn dengan paradigma baru bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (*civic competence*) untuk semua jenjang SD/MI, SLTP/MTs, dan SM/MA. Kemampuan dasar tersebut selanjutnya diuraikan atau dirinci dalam bentuk sejumlah kemampuan disesuaikan dengan tingkat/jenjang sekolah sejalan dengan tingkat perkembangan para siswa. Kemampuan diuraikan lagi dalam bentuk butiran standar materi dan kata kunci standar pencapaian. Contoh, Kemampuan Dasar: “Menyadari hakikat individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan warga negara Indonesia yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya.” Kemampuan dasar yang pertama ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk kemampuan, standar materi dan kata kunci standar pencapaian untuk siswa sekolah dasar dalam bentuk matriks sebagai berikut.

No.	Kemampuan Dasar	Kemampuan	Standar Materi	Kata Kunci Standar Pencapaian
1.	Menyadari hakikat individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan warga negara Indonesia yang mampu ber-interaksi dengan lingkungannya	Memahami makna ajaran agama masing-masing dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Kehidupan ber-agama dalam lingkungan masyarakat dan negara	Makna ajaran agama dalam konteks kehidupan keluarga

Demikianlah contoh cuplikan materi pembelajaran PKn dengan paradigma baru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan dasar tersebut dapat dibelajarkan untuk mencapai tujuan PKn, yakni membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam kehidupan politik serta taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa model pembelajaran PKn dengan paradigma baru hendaklah dapat mengakomodasi untuk pencapaian tujuan PKn itu sendiri. Selanjutnya Anda akan diajak untuk mengenal model pembelajaran tersebut, ialah model pembelajaran yang berbasis portofolio. Model Pembelajaran yang diintroduksi sebagai model inovatif dan diterapkan secara terbatas di delapan provinsi pionir mulai tahun 2001 adalah suatu model belajar berbasis portofolio (MBBP) atau *portfolio-based learning* (PBL) yang telah diadaptasikan dengan kondisi Indonesia melalui perintisan di enam SLTP Negeri di Jawa Barat sejak tahun 2000. Model tersebut diberi nama “Proyek-Belajar Kewarganegaraan: Kami Bangsa Indonesia” yang disingkat menjadi model “PKKBI”.

Model PKKBI di adaptasi dari model “*We the People....Project Citizen*” yang dikembangkan oleh *Center for Civic Education (CCE)*, dan dalam 15 tahun terakhir ini telah di adaptasi di sekitar 50 negara di dunia, termasuk Indonesia. Model ini bersifat

generik-pedagogik, yang dapat dimuat konten/ materi yang relevan di masing-masing lingkungan. Sebagai model dipilih masalah “Public Policy” (Kebijakan Publik), yang memang berlaku di manapun. Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan dengan kapasitasnya sebagai “young citizen” atau warga negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab”.

Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning*” yang dikemas dalam model “Project” ala John Dewey. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat.
2. Memilih suatu Masalah untuk dikaji oleh kelas.
3. Mengumpulkan Informasi yang terkait pada Masalah itu.
4. Mengembangkan Portofolio kelas.
5. Menyajikan Portofolio.
6. Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar.

Dalam setiap langkah siswa belajar secara mandiri dalam kelompok kecil dengan fasilitasi dari guru dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah (manusia, bahan tertulis, bahan terekam, bahan tersiar, alam sekitar, artifak, situs sejarah,). Di situlah berbagai keterampilan dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi.

Portofolio adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis yang melukiskan proses berpikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, yang secara utuh melukiskan “*integrated learning experiences*” atau pengalaman belajar yang terpadu yang dialami oleh siswa dalam kelas sebagai suatu kesatuan. Portofolio terbagi dalam dua bagian yakni “Portofolio tampilan”, dan “Portofolio dokumentasi”. Portofolio Tampilan berbentuk papan empat muka berlipat yang secara berurutan menyajikan:

1. Rangkuman Permasalahan yang dikaji.
2. Berbagai Kebijakan Pemecahan Masalah.
3. Usulan Kebijakan untuk Memecahkan Masalah.
4. Pengembangan Rencana Kerja/Tindakan.

Sedangkan Portofolio Dokumentasi dikemas dalam Map Ordner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan Portofolio Tampilan.

Portofolio tampilan dan Dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi “*Public Hearing*” atau dengar pendapat yang menghadirkan pejabat setempat yang terkait dengan masalah portofolio tersebut. Acara dengar pendapat dapat dilakukan di masing-masing kelas atau dalam suatu acara “*Show Case*” atau “Gelar Kemampuan”

bersama dalam suatu acara sekolah, misalnya di akhir catur wulan. Bila dikehendaki arena “*Show case*” tersebut dapat pula dijadikan arena “*contest*” atau kompetisi untuk memilih kelas portofolio terbaik untuk selanjutnya dikirim ke dalam “*Show case and Contest*” antar sekolah dalam lingkungan Kabupaten/Kota madya atau malah untuk acara regional propinsi atau nasional. Tujuan semua itu antara lain untuk saling berbagi ide dan pengalaman belajar antar “*young citizens*” yang secara psiko-sosial dan sosial-kultural pada gilirannya akan dapat menumbuhkembangkan “*ethos*” demokrasi dalam konteks “*harmony in diversity*”. Setelah acara dengan pendapat, dengan fasilitasi guru diadakan kegiatan “refleksi” yang bertujuan untuk secara individual dan bersama merenungkan dan mengendapkan dampak perjalanan panjang proses belajar bagi perkembangan pribadi siswa sebagai warga negara.

Namun demikian, perlu Anda ingat bahwa model pembelajaran ini perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa bahkan tingkat perkembangannya. Guru dapat memodifikasi model ini dengan tidak mengubah prinsip-prinsip pokok.

Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Panduan-panduan ini beragam tergantung pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan:

1. hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih;
2. hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut;
3. kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut;
4. rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan.

Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas/siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasayarakatan.

Dalam menilai portofolio, “karya terpilih” merupakan istilah yang sangat penting. Yang harus menjadi akumulasi dari segala sesuatu yang dapat ditemukan para siswa pada topik mereka bukanlah seksi penayangan dan bukan pula seksi pendokumentasian. Melainkan, portofolio harus memuat bahan-bahan yang menggambarkan usaha terbaik siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta mencakup pertimbangan terbaiknya tentang bahan-bahan mana yang paling penting.

Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka untuk menerapkan secara kontekstual metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik, khusus-nya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan *civic commitment* atau komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya dengan cara:

1. membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif;
2. membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas partisipasi;
3. mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga Negara.

Pembelajaran ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pemahaman siswa tentang bagaimana bangsa Indonesia, yakni kita semua, dapat bekerja sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat, bagaimana cara menentukan tingkat pemerintahan dan lembaga pemerintah manakah yang paling tepat dan layak untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi oleh mereka, dan bagaimana cara mempengaruhi penetapan-penetapan kebijakan pada tingkat pemerintahan tersebut. Pembelajaran ini mengajak para siswa untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas dan, dengan bantuan guru serta para relawan, agar tercapai tugas-tugas pembelajaran berikut.

1. Mengidentifikasi masalah kontekstual yang akan dikaji.
2. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari berbagai sumber berkenaan Mengkaji pemecahan masalah secara interdisipliner.
3. Membuat kebijakan publik untuk lingkungan terbatas.
4. Membuat rencana tindakan terkait kebijakan publik yang diusulkan.

Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui enam tahap kegiatan sebagai berikut.

Tahap I : Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik di Masyarakat.

Tahap II : Memilih Satu Masalah untuk dijadikan fokus Kajian Kelas.

Tahap III : Mengumpulkan Informasi tentang Masalah yang Akan Dikaji Kelas.

Tahap IV : Membuat Portofolio Kelas.

Tahap V : Menyajikan Portofolio.

Tahap VI : Refleksi terhadap Pengalaman Belajar.

Dalam pembelajaran PKn yang berbasis portofolio, kelas dibagi ke dalam empat kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas.

Apa saja tugas dari keempat kelompok portofolio tersebut? Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda, namun mulai kelompok pertama sampai keempat harus

saling terkait (sekuensial) dan merupakan satu kesatuan. Adapun tugas mereka dapat diuraikan sebagai berikut (CCE:1996; CICED:2001; CCEI: 2004; Mandikdasmen: 2006).

1. Kelompok Portofolio Satu: Menjelaskan Masalah

Kelompok portofolio satu ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa lembaga pemerintahan tersebut harus menangani masalah tersebut.

2. Kelompok Portofolio Dua: Menilai Kebijakan Alternatif yang Diusulkan untuk Memecahkan Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan/atau kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah.

3. Kelompok Portofolio Tiga: Membuat Satu Kebijakan Publik yang akan Didukung oleh Kelas

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan publik tertentu yang disepakati untuk didukung oleh mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut.

4. Kelompok Portofolio Empat: Membuat Suatu Rencana Tindakan agar Pemerintah Mau Menerima Kebijakan Kelas

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Bahan-bahan dalam portofolio memuat dokumentasi terbaik yang telah dikumpulkan oleh kelas dan kelompok dalam meneliti masalah. Bahan-bahan dalam portofolio itu pun hendaknya memuat bahan-bahan tulis tangan asli dan/atau karya seni asli para siswa.

Bagaimana kedudukan dari portofolio tersebut? Karya dari keempat kelompok akan diutamakan pada portofolio kelas. Karya tersebut memiliki dua bentuk yakni: **Portofolio Tayangan dan Portofolio Dokumentasi.**

1. **Portofolio Tayangan.** Bentuk tayangan ini hasil karya (hasil penelitian dan pengumpulan informasi) masing-masing dari keempat kelompok ditempelkan pada satu bidang panel dari papan tayangan empat-panel. Tayangan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja, papan buletin atau pada empat kuda-kuda.

Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber, peta, grafik, foto, karya seni asli, dan sebagainya.

2. **Portofolio Dokumentasi.** Masing-masing dari keempat kelompok harus memilih dari bahan-bahan yang terkumpul, bahan-bahan terbaik yang mendokumentasikan

atau memberi bukti penelitiannya. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam seksi dokumen harus mewakili contoh-contoh penelitian terpenting dan/atau paling bermakna yang telah dikerjakan siswa. Tidak semua penelitian harus dimasukkan. Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam sebuah map jepit. Gunakan pemisah berwarna beda untuk memisahkan keempat seksi dokumentasi dari keempat kelompok portofolio tersebut. Siapkan daftar isi untuk setiap seksi.

Perincian Tugas Setiap Kelompok Portofolio

Kelompok Satu: Menjelaskan masalah

Kelompok satu bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah pada seksi penayangan dan seksi dokumentasi bagian pertama dari portofolio kelas.

1. Portofolio Tayangan Kelompok Satu

Bagian ini hendaknya memuat hal-hal berikut.

a. Rangkuman masalah secara tertulis

Penjelasan masalah ditulis *tidak lebih dari dua halaman dengan diketik dua spasi*. Rangkuman berisikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana seriusnya masalah yang ada di masyarakat?
- 2) Seberapa luas masalah tersebut dirasakan oleh masyarakat?
- 3) Mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Haruskah seseorang juga bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut? Mengapa?
- 4) Manakah di antara pernyataan berikut ini yang kalian anggap benar?
 - a) Tidak ada hukum atau kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.
 - b) Hukum untuk mengatasi masalah tersebut tidak memadai.
 - c) Hukum untuk mengatasi masalah tersebut memadai, tetapi tidak ditegakkan dengan baik.
- 5) Adakah silang pendapat di masyarakat berkenaan dengan masalah tersebut?
- 6) Siapakah orang, kelompok atau organisasi masyarakat yang berpihak pada masalah tersebut?
 - a) Mengapa mereka menaruh perhatian terhadap masalah tersebut?
 - b) Bagaimanakah pendirian mereka?
 - c) Apakah keuntungan dan kerugian dari pendirian tersebut?
 - d) Bagaimana mereka berusaha mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan-pandangan mereka?
- 7) Jika ada, tingkat atau lembaga pemerintahan mana yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan berkenaan dengan masalah tersebut?

b. Penyajian masalah dengan grafik

Penyajian ini dapat meliputi peta, grafik, foto, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi dapat saja berasal dari sumber-sumber cetak atau hasil karya asli siswa. Setiap ilustrasi hendaknya memiliki judul halaman atau bab.

c. *Identifikasi sumber-sumber informasi*

Identifikasi sumber-sumber yang telah digunakan kelas siswa pada satu atau lebih halaman ketik.

2. Portofolio Dokumentasi Kelompok Satu

Informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh kelas dalam mengkaji dan menjelaskan masalah dimasukkan pada Bagian 1 map jepit kelas. Misalnya, siswa dapat memasukkan bahan-bahan terpilih berupa:

- a. kliping surat kabar dan majalah;
- b. laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- c. laporan tertulis hasil ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- d. hasil komunikasi dengan kelompok kepentingan yang bersifat publik dan swasta; dan
- e. petikan dari sejumlah publikasi pemerintah.

Dokumen dan laporan panjang hendaknya diwakili oleh lembar photo copy halaman judul, daftar isi, dan satu halaman rangkuman dari dokumen itu sendiri maupun yang disalin oleh kelompok. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

Kelompok Dua: Mengkaji Kebijakan Alternatif untuk Mengatasi Masalah

Kelompok dua bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan menilai kebijakan saat ini dan/atau kebijakan alternatif yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Temuan kelompok ini disajikan pada seksi penayangan dan dokumentasi yang kedua dari portofolio kelas.

1. Portofolio Tayangan Kelompok Dua

Bagian ini hendaknya memuat hal-hal berikut.

- a. Rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif. Siswa memilih 2 atau 3 kebijakan yang diusulkan oleh perseorangan atau kelompok. Untuk setiap kebijakan yang dipilih oleh siswa, disertakan rangkuman jawaban siswa atas pertanyaan berikut dalam 1 halaman diketik 2 spasi.
 - 1) Kebijakan apakah yang diusulkan oleh siswa perseorangan atau kelompok?
 - 2) Apakah keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut?
- b. Penyajian kebijakan melalui grafik. Penyajian ini dapat meliputi peta, grafik, foto, lukisan, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Ilustrasi dapat saja berasal dari sumber-sumber cetak atau dapat juga dari karya asli siswa. Setiap ilustrasi hendaknya memiliki judul halaman atau bab.
- c. Identifikasi sumber-sumber informasi. Identifikasi sumber-sumber yang telah digunakan kelas untuk mengumpulkan informasi pada satu atau lebih halaman ketik.

2. Portofolio Dokumentasi Kelompok Dua

Dokumentasi bagian 2 dari map jepit kelas memuat lembar fotokopi informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan kelas dalam mengkaji dan menilai kebijakan-kebijakan saat ini dan kebijakan-kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Misalnya, siswa dapat memasukkan bahan-bahan terpilih berupa:

- a. kliping surat kabar dan majalah;
- b. laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- c. laporan tertulis hasil ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- d. hasil komunikasi dengan kelompok kepentingan yang bersifat publik dan swasta;
- e. petikan dari sejumlah publikasi pemerintah.

Dokumen dan laporan yang panjang hendaknya diwakili oleh lembar photo copy halaman judul, daftar isi, dan satu halaman rangkuman dari dokumen itu sendiri maupun hasil salinan yang ditulis oleh kelompok siswa sendiri. Buatlah daftar isi untuk seksi ini.

Kelompok Portofolio Tiga: Mengusulkan Kebijakan Alternatif untuk Mengatasi Masalah

Kelompok 3 bertanggung jawab mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah yang dikaji. Kebijakan yang dipilih kelompok ini harus disetujui oleh mayoritas anggota kelas. Kebijakan yang diusulkan hendaknya tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara.

Setelah diperoleh kepastian maka kelas dapat memilih untuk:

1. mendukung salah satu kebijakan alternatif yang diidentifikasi oleh Kelompok Portofolio Dua;
2. memodifikasi salah satu kebijakan; atau
3. membuat kebijakan siswa sendiri.

1. Portofolio Tayangan Kelompok Tiga

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. Penjelasan dan justifikasi tertulis untuk kebijakan yang diusulkan oleh kelompok portofolio. Siswa kelompok ini hendaknya menjelaskan kebijakan yang dipilih siswa dan alasan siswa mendukungnya. Deskripsikan dalam dua halaman tik dua spasi :
 - 1) kebijakan yang diyakini oleh kelas akan mengatasi masalah.
 - 2) keuntungan dan kerugian dari kebijakan kelas?
 - 3) Menurut pandangan kelas, mengapa kebijakan tersebut tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. Para siswa perlu bekerja sama dengan seluruh kelas untuk melengkapi bagian portofolio ini.
 - 4) Tingkat atau lembaga pemerintahan mana yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang kalian usulkan? Mengapa?

- b. Penyajian kebijakan yang diusulkan melalui grafik. Penyajian ini dapat meliputi peta, grafik, foto, lukisan, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dan masalah yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Ilustrasi dapat saja berasal dari sumber-sumber cetak atau dapat juga karya asli siswa. Setiap ilustrasi hendaknya memiliki judul halaman atau bab.
- c. Identifikasi sumber-sumber informasi. Identifikasi sumber-sumber yang telah digunakan oleh kelas untuk mengumpulkan informasi pada satu atau lebih halaman ketik.

2. Portofolio Dokumentasi Kelompok Tiga

Masukkan ke dalam Bagian 3 dari map jepit kelas, lembar photo copy informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan kelas dalam mengkaji dan menilai kebijakan saat ini dan alternatif untuk mengatasi masalah. Misalnya, siswa dapat memasukkan bahan-bahan terpilih berupa:

- a. kliping surat kabar dan majalah;
- b. laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- c. laporan tertulis hasil ulasan radio dan televisi tentang masalah;
- d. hasil komunikasi dengan kelompok kepentingan, baik publik maupun swasta;
- e. petikan dari sejumlah publikasi pemerintah.

Dokumen dan laporan yang panjang hendaknya diwakili oleh lembar photo copy halaman judul, daftar isi, dan satu halaman rangkuman dari dokumen itu sendiri maupun salinannya yang ditulis oleh kelompok. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

Kelompok Portofolio Empat: Membuat Rencana Tindakan

Kelompok siswa bertanggung jawab untuk membuat rencana tindakan. Rencana tindakan ini hendaknya mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Seluruh kelas hendaknya terlibat dalam membuat rencana tindakan ini, tetapi kelompok empat akan menjelaskan rencana tindakan dalam Bagian 4 dari Seksi penayangan dan Bagian 4 dari Seksi dokumentasi portofolio kelas.

1. Portofolio Tayangan Kelompok Empat

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. Penjelasan tertulis tentang bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rencana yang diusulkan. Deskripsikan gagasan-gagasan utama dari rencana kalian pada satu halaman tik dua spasi. Pastikan untuk:
 - 1) mengidentifikasi individu dan kelompok berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung kebijakan yang siswa usulkan.

- Gambarkan secara ringkas bagaimana siswa dapat memperoleh dukungan mereka;
- 2) mengidentifikasi kelompok di masyarakat yang mungkin menentang kebijakan siswa. Jelaskan bagaimana siswa dapat meyakinkan mereka untuk mendukung kebijakan yang di usulkan.
- b. Penjelasan tertulis tentang bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dari pemerintah terhadap kebijakan yang diusulkan. Gambarkan gagasan-gagasan utama dari rencana siswa pada satu halaman tik dua spasi. Pastikan untuk:
- 1) mengidentifikasi pejabat dan lembaga pemerintah berpengaruh yang mungkin akan mendukung kebijakan siswa. Gambarkan dengan singkat bagaimana siswa dapat memperoleh dukungan mereka terhadap kebijakan yang diusulkan;
 - 2) mengidentifikasi orang-orang dalam pemerintah yang mungkin menentang kebijakan siswa.
- c. Penyajian rencana tindakan melalui grafik. Penyajian ini dapat meliputi peta, grafik, foto, lukisan, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi dapat saja berasal dari sumber-sumber cetak atau dapat juga berupa karya asli siswa sendiri. Setiap ilustrasi hendaknya memiliki judul halaman atau bab.
- d. Identifikasi sumber-sumber informasi. Identifikasi sumber-sumber yang digunakan oleh kelas untuk mengumpulkan informasi pada satu atau lebih halaman ketik.

2. Portofolio Dokumentasi Kelompok Empat

Masukkan ke dalam Bagian 4 dari map jepit kelas lembar photo copy informasi terbaik yang dikumpulkan dan digunakan oleh kelas dalam pengembangan rencana tindakan. Misalnya, siswa dapat memasukkan sebagai dokumentasi bahan-bahan terpilih berupa:

- a. pernyataan dari orang-orang atau kelompok berpengaruh;
- b. pernyataan para pejabat pemerintah yang berpengaruh;
- c. kliping surat kabar dan majalah;
- d. laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- e. laporan tertulis hasil ulasan radio dan televisi tentang masalah;
- f. hasil komunikasi dengan kelompok kepentingan, baik publik maupun swasta;
- g. petikan dari sejumlah publikasi pemerintah.

Dokumentasi dan laporan yang panjang hendaknya diwakili oleh lembar photo copy halaman judul, daftar isi, dan satu halaman rangkuman dari dokumen itu sendiri maupun dari salinan yang ditulis oleh kelompok. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

Walaupun setiap kelompok mempunyai tugas khusus, mereka perlu saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk berbagi pemikiran dan informasi. Setiap kelompok hendaknya menjaga agar seluruh kelas mengetahui betul kemajuannya

dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lainnya sehingga kelas tersebut dapat membuat portofolio terbaiknya.

Kelompok-kelompok portofolio hendaknya bekerja sama sejak mereka memutuskan item-item khusus apa yang harus termasuk dalam seksi tayangan dan seksi dokumentasi portofolio. Kerja sama ini akan menghindarkan penayangan ulang informasi yang sama dan menjamin peliputan bukti-bukti yang terbaik.

Penilaian portofolio dilakukan terhadap dua hal, yaitu portofolio masing-masing dari keempat kelompok portofolio, dan portofolio keseluruhan (kelas). Untuk menilai portofolio, digunakan kriteria berikut.

Kriteria untuk menilai portofolio kelompok (1 – 4)

1. Kelengkapan

Apakah setiap seksi memuat bahan-bahan yang diuraikan pada deskripsi tugas setiap kelompok di atas? Apakah para siswa memasukkan bahan-bahan lebih dari yang diperlukan?

2. Kejelasan

Apakah portofolio siswa tersusun dengan baik? Apakah portofolio siswa ditulis dengan jelas, menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar? Apakah gagasan-gagasan utama dan argumen-argumen di dalamnya mudah dipahami?

3. Informasi

Apakah informasinya akurat? Apakah informasinya memuat fakta-fakta utama dan konsep-konsep penting? Apakah informasi yang siswa masukkan penting untuk memahami topik kajian?

4. Dukungan

Apakah siswa memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan atau mendukung gagasan-gagasan utama?

Apakah siswa memberikan penjelasan mendalam untuk gagasan-gagasan utama tersebut?

5. Grafik

Apakah grafik siswa berkaitan secara khusus dengan isi dari seksi portofolionya? Apakah grafik siswa memberikan informasi? Apakah masing-masing grafik memiliki judul?

Apakah grafik siswa membantu untuk memahami tayangannya?

6. Dokumentasi

Apakah siswa mendokumentasikan gagasan-gagasan utama pada seksi portofolionya? Apakah siswa menggunakan sumber-sumber yang sah, tepercaya, dan variatif? Jika siswa mengutip atau menyadur sumber informasi, apakah mereka menghargainya pada setiap kutipan?

Apakah dokumentasi siswa berkaitan dengan tayangan? Apakah siswa memilih sumber-sumber informasi terbaik dan terpenting?

7. **Kekonstitusionalan**

Apakah siswa memasukkan Format Pendapat Kekonstitusionalan?

Apakah siswa menjelaskan mengapa kebijakan yang diusulkan oleh mereka tidak melanggar Konstitusi?

Demikianlah model pembelajaran PKn yang berbasis portofolio. Namun, untuk penerapan di sekolah dasar, guru perlu melakukan proses penyederhanaan lagi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia sekolah dasar. Demikian pula dalam proses identifikasi dan pemilihan masalah. Masalah kelas hendaknya masalah yang dipilih sendiri oleh siswa.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah portofolio itu?
- 2) Bagian mana Portofolio diterapkan dalam pembelajaran PKn?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan di atas, coba Anda bentuk kelompok, masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu diskusikan dengan sesama anggota kelompok tersebut.



Rangkuman

Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian guru atau calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran.

Materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk Standar Isi yang bersifat nasional PKn yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, yakni (1) kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan; (2) standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran; (3) indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan; dan (4) rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.

PKn dengan paradigma baru bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (*civic competence*) untuk semua jenjang. Sedangkan pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (*Portfolio-based learning*) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut.

Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih.

Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya.

Langkah-langkah pembelajaran PKn yang berbasis portofolio meliputi (1) mengidentifikasi masalah yang akan dikaji; (2) mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji; (3) mengkaji pemecahan masalah; (4) membuat kebijakan publik; (5) membuat rencana tindakan.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Proses pembelajaran PKn dengan paradigma baru hendaknya berorientasi pada pengembangan tiga kemampuan, *kecuali*
 - A. kecerdasan warga negara
 - B. tanggung jawab warga negara
 - C. partisipasi warga negara
 - D. pemecahan masalah warga negara

- 2) Kecerdasan warga negara yang perlu dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran PKn dengan paradigma baru hendaknya meliputi aspek
 - A. afektif, emosional, pemikiran dan sikap
 - B. rasional, intelektual, pemikiran dan emosional
 - C. spiritual, rasional, emosional dan sosial
 - D. spiritual, sikap, intelektual, dan sosial

- 3) Karakteristik yang menjadi kriteria dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru dapat dilihat pada
 - A. kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan
 - B. standar materi kewarganegaraan
 - C. indikator pencapaian
 - D. rambu-rambu umum pembelajaran

- 4) Penjabaran materi pembelajaran PKn dengan paradigma baru yang paling operasional terdapat pada kolom
 - A. kemampuan dasar
 - B. kemampuan
 - C. standar materi kewarganegaraan
 - D. standar pencapaian

- 5) Portofolio dalam proses pembelajaran PKn di kelas pada hakikatnya merupakan kumpulan
 - A. informasi yang tersusun dengan baik
 - B. pekerjaan guru untuk siswa
 - C. pekerjaan karyawan sekolah
 - D. pekerjaan kepala sekolah

- 6) Bentuk portofolio dalam pembelajaran PKn dapat berupa pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi yang
 - A. menarik secara estetika
 - B. mengandung informasi yang terkait dengan masalah
 - C. beragam dilihat dari segi keilmuan
 - D. bernilai seni tinggi

- 7) Proses pembelajaran PKn yang berbasis portofolio bertujuan membina komitmen siswa terhadap kewarganegaraannya dengan cara, *kecuali*
 - A. membekali pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif
 - B. memberikan doktrin dalam hidup berkewarganegaraan
 - C. membekali pengalaman praktis untuk mengembangkan kompetisi
 - D. mengembangkan pemahaman partisipasi warga negara

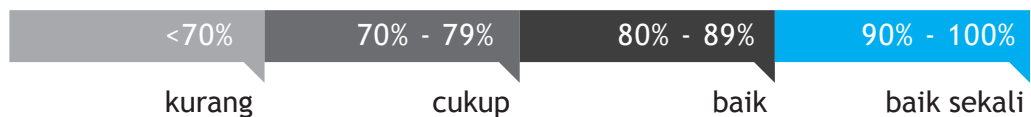
- 8) Langkah-langkah pembelajaran PKn yang berbasis portofolio diakhiri dengan
 - A. mengumpulkan dan menilai informasi
 - B. mengkaji pemecahan masalah
 - C. membuat rencana tindakan
 - D. membuat kebijakan publik

- 9) Kelompok I (Satu) siswa dalam pembelajaran PKn berbasis portofolio memiliki tugas
- A. menjelaskan masalah
 - B. menilai kebijakan alternatif
 - C. membuat kebijakan publik
 - D. membuat rencana tindakan
- 10) Untuk menilai portofolio yang dibuat oleh siswa, juri dapat melihat portofolio dari sudut, *kecuali*
- A. kelengkapan
 - B. kejelasan
 - C. estetika
 - D. dukungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Kebebasan tanpa batas.
- 2) C. Rakyat memiliki pandangan yang sama terhadap pemimpinnya.
- 3) A. Memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya.
- 4) C. Demokrasi merupakan praktek dan prosedur pelaksanaan kebebasan.
- 5) D. Memiliki dukungan yang lebih banyak.
- 6) B. Pemisahan kekuasaan negara secara tegas.
- 7) A. Mampu berpikir kritis dan sistematis.
- 8) C. Pemerintah dan yang diperintah sama-sama sebagai warga negara
- 9) D. Sistem ideologis.
- 10) B. Partisipasi warga negara yang penuh nalar dan bertanggung jawab.

Tes Formatif 2

- 1) D. Pemecahan masalah warga negara.
- 2) C. Spiritual, rasional, emosional, dan sosial.
- 3) D. Rambu-rambu umum pembelajaran.
- 4) D. Standar pencapaian.
- 5) A. Kumpulan informasi yang disusun dengan baik.
- 6) B. Mengandung informasi yang terkait dengan masalah.
- 7) B. Memberikan doktrin dalam hidup berkewarganegaraan.
- 8) C. Membuat rencana tindakan.
- 9) A. Menjelaskan masalah.
- 10) C. Estetika.

Daftar Pustaka

- Alamudi, Abdullah (Ed). (1991). *Apakah Demokrasi Itu?* Jakarta: USIA.
- Bahmuller, C.E. (1996). *The Future of Democracy and Education for Democracy*. Calabasas: Center for Civic Education (CCE).
- Center for Civic Education. (1996). *We The People ... Project Citizen: Teacher's Guide*, Calabasas: California.
- Center for Civic Education. (1996). *We The People ... Project Citizen: Student Textbook*, Calabasas: California.
- Depdiknas (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22, Tahun 2006, tentang Standar Isi. Jakarta.
- Depdiknas (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23, Tahun 2006, Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta.
- Ditjen Mandikdasmen. (2006). *Pengembangan Sekolah sebagai Wahana Pengembangan Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Sanusi, Achmad. (1998). *Sepuluh Pilar Demokrasi Konstitusional Menurut UUD 1945*. (Makalah).
- Winataputra, U.S. (2007). *Laporan Pengembangan Sekolah sebagai Wahana Pengembangan Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab*, Jakarta (Makalah)
- Winataputra, U.S. (2001). *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (Disertasi)